

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan isu ekonomi serta politik internasional di abad 20 sampai 21 memunculkan interdisipliner baru dalam studi Hubungan Internasional, yaitu Ekonomi Politik Internasional (EPI). Premis terkait EPI muncul pertama kali di masa tahun 1970-an, yaitu ketika muncul beberapa fenomena yang membutuhkan penjelasan tidak hanya dari perspektif ekonomi internasional, namun juga dari perspektif politik internasional (Bakry, 2019). Adapun contoh dari fenomena-fenomena tersebut adalah kebangkitan Tiongkok dan negara industri baru di dunia ketiga yang membuktikan adanya sinergi antara kepentingan ekonomi dan kebijakan politik suatu negara yang berkontribusi dalam perkembangan ekonominya. Tidak hanya itu, fenomena munculnya sistem moneter baru di era pasca Perang Dunia 2, seperti *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan *World Trade Organization* (WTO) yang bertujuan untuk mengatur sistem perekonomian dunia juga dilatarbelakangi oleh kepentingan politik dari negara-negara tertentu .

Di masa sekarang, banyak isu-isu ekonomi politik yang terjadi dalam dunia internasional. Kerja sama antar negara tidak lagi hanya didukung oleh kepentingan politik, namun juga kepentingan ekonomi. Salah satu contoh dari kerja sama ekonomi tersebut adalah proyek *Belt and Road Initiative* milik Tiongkok yang pertama kali dicetuskan oleh

Presiden Xi Jinping di tahun 2013. Proyek *Belt and Road Initiative* merupakan pusat skema kebijakan luar negeri Tiongkok yang berambisi untuk membangun infrastruktur berupa jalur perdagangan di darat dan laut dengan tujuan memfasilitasi aktivitas ekonominya dari dalam sampai ke luar wilayah Asia (Marsden, 2021).

Selama proses berjalannya pembangunan dan perdagangan di jalur BRI, angka perdagangan dari proyek BRI di kuartir pertama tahun 2021 meningkat sebesar 27% atau 826 miliar dolar Amerika. Sebagai sebuah proyek yang cukup masif, BRI dapat memberikan pengaruh cukup besar dalam dinamika perekonomian internasional, terutama bagi negara-negara yang ikut serta di dalamnya (*Silk Road Briefing*, 2021). Maka dari itu, proyek BRI ini diambil sebagai salah satu fenomena dalam penelitian ini. Karena cakupan dan pengaruh dari cukup luas dan berpengaruh, perlu untuk mengetahui lebih lanjut terkait mengapa proyek tersebut dilaksanakan atau terkait dampak dari adanya proyek BRI ini di negara-negara yang terlibat.

Dari sekian banyak kerja sama ekonomi dari proyek BRI tersebut, Tiongkok juga melakukan kerja sama dengan Afghanistan. Afghanistan pertama kali ikut dalam proyek BRI pada tahun 2016. Namun, pada saat itu proyek BRI tidak terlalu fokus ke wilayah Afghanistan. Walaupun Afghanistan dianggap sebagai salah satu pusat geopolitik yang penting di Asia Tengah, ditambah dengan potensi wilayah dan sumber daya alam yang melimpah, situasi keamanan yang tidak memadai pada masa itu

membuat Tiongkok tidak menaruh fokusnya di Afghanistan (Encarnation & Fair, 2023). Namun, Tiongkok kemudian tertarik untuk kembali melanjutkan proyek BRI di Afghanistan pasca peristiwa transisi pemerintahan Afghanistan kepada kelompok Taliban yang terjadi pada tahun 2021. Karena adanya perubahan dari perilaku Tiongkok terhadap proyek BRI di Afghanistan tersebut, penyebab dari perubahan perilaku ini menarik untuk dianalisis dan diteliti lebih lanjut.

Pada Agustus tahun 2021, Ibu Kota Kabul berhasil diambil alih oleh Taliban, sebuah kelompok fundamentalis Islam yang cukup dominan di Afghanistan. Peristiwa ini merupakan turunan dari rentetan konflik bersenjata antara kelompok Taliban dan pasukan militer pemerintahan Afghanistan serta Amerika Serikat pasca ditandatanganinya perjanjian Doha pada tahun 2021. Perjanjian Doha merupakan bentuk perjanjian damai antara kelompok Taliban dan Amerika Serikat yang berisi linimasa terkait penarikan pasukan Amerika Serikat dari wilayah Afghanistan (*Center for Preventive Action*, 2022). Setelah lebih dari 20 tahun menempati wilayah Afghanistan, Amerika Serikat sepakat untuk menarik pasukan militernya dalam waktu 14 bulan setelah perjanjian tersebut ditandatangani. Sebaliknya, Taliban menyetujui ketentuan perjanjian yang mengharuskan Taliban untuk memulai proses negosiasi damai dengan pemerintah Afghanistan. Selain itu, Taliban juga wajib untuk menjaga wilayah yang berada di bawah kekuasaannya agar tidak digunakan oleh kelompok teroris.

Walaupun perjanjian Doha ini dinyatakan sebagai perjanjian damai, tidak ada pernyataan gencatan senjata antara kedua belah pihak. Hal ini menyebabkan situasi damai yang diciptakan dari perjanjian tersebut tidak bertahan lama. Tidak lama setelah penandatanganan perjanjian Doha, Taliban kembali melakukan serangan-serangan terhadap pasukan militer dan penduduk sipil Afghanistan. Upaya negosiasi antara kelompok Taliban dan Pemerintah Afghanistan sudah dilakukan sebulan setelah penandatanganan perjanjian Doha, namun proses negosiasi tersebut terhambat dan tidak menghasilkan apapun. Konfrontasi bersenjata antara Taliban, pasukan militer Afghanistan dan Amerika Serikat terus terjadi sampai akhirnya berkurang pada bulan September 2021, ketika Presiden Joe Biden menarik pasukan militer Amerika Serikat secara paksa dari wilayah Afghanistan. Peristiwa ini diikuti oleh serangan-serangan kelompok Taliban yang semakin intens terhadap beberapa kota di Afghanistan. Hingga pada Agustus 2021, Taliban berhasil mengambil alih ibu kota Kabul dan menduduki pemerintahan Afghanistan (*Center for Preventive Action*, 2022).

Naiknya Taliban ke kursi pemerintahan Afghanistan mendapat respon yang variatif dari berbagai negara. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang tidak mengakui kedaulatan Taliban sebagai pemerintahan resmi Afghanistan. Hal ini karena rekam jejak kelompok tersebut yang dahulu dikenal sebagai salah satu kelompok teroris ekstrimis islam (Al Jazeera, 2021a). Selain Amerika Serikat, banyak negara barat

lainnya yang tidak mendukung pemerintahan Afghanistan yang baru. Salah satunya adalah Inggris yang menyatakan tidak mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan (Al Jazeera, 2021c). Kemudian, negara-negara Uni Eropa juga menunjukkan ketidak inginan untuk mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana sejumlah 27 negara anggota Uni Eropa menarik staff diplomatiknya dari Kabul pasca pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada tahun 2021 (Al Arabiya, 2022). Penarikan staf diplomatik tersebut kemudian juga mengekspresikan respon tidak setuju terhadap Keputusan pemerintahan Afghanistan yang berada di bawah kuasa Taliban.

Selain sikap dari negara-negara barat, pemerintahan Afghanistan di bawah Taliban juga tidak mendapatkan pengakuan secara eksplisit di dalam beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB. Dalam resolusi 2596 tahun 2021 terkait Perpanjangan Mandat UNAMA (*United Nations Assistance Mission in Afghanistan*) sampai 17 Maret 2022, tidak ada pernyataan atau penyebutan Taliban sebagai pemerintahan resmi Afghanistan. Dalam resolusi tersebut pula Dewan Keamanan PBB mendorong terbentuknya representatif pemerintahan Afghanistan yang inklusif dan menjunjung tinggi implementasi Hak Asasi Manusia, terutama untuk perempuan dan anak (Dewan Keamanan PBB, 2021). Adapun penegasan terhadap resolusi tersebut terdapat dalam resolusi 2626 tahun 2022 tentang Perpanjangan Mandat UNAMA sampai 17 Maret 2023. Resolusi ini menegaskan terkait implementasi Hak Asasi Manusia

dan kesetaraan gender yang tidak berjalan dengan maksimal di Afghanistan. Sama seperti resolusi sebelumnya, tidak ada penyebutan Taliban sebagai pemerintahan resmi di Afghanistan, juga terdapat penegasan kembali terkait pembentukan pemerintahan Afghanistan yang inklusif dan serius dalam menegakkan Hak Asasi Manusia (Dewan Keamanan PBB, 2022).

Faktor utama yang menyebabkan negara-negara di dunia tidak mengakui kedaulatan pemerintahan Taliban selain karena rekam jejak kelompok tersebut adalah, pasca pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban, banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintahan tersebut. Pelanggarannya berupa tindakan intimidasi jurnalis dan membatasi aktivitas pers. Pemerintahan Taliban juga melakukan pembatasan terhadap hak-hak asasi wanita. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya anggota pemerintahan dengan jenis kelamin perempuan dalam kabinet yang dibentuk oleh Taliban. Selain itu, perempuan di Afghanistan juga tidak diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan (Maizland, 2022).

Berbeda dari negara-negara Barat, Tiongkok sebagai salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Afghanistan memiliki respons yang lebih positif. Juru bicara Menteri luar negeri Tiongkok menyatakan bahwa mereka (pemerintahan Tiongkok) menghargai keputusan Afghanistan yang berada di bawah kuasa Taliban dan berharap pemerintahan Taliban dapat bertanggung jawab dan memastikan keamanan masyarakatnya dalam proses transisi pemerintahan (Tiezzi,

2021). Tiongkok kemudian setuju untuk melanjutkan beberapa kerja sama ekonominya dengan pemerintah Afghanistan sebelumnya, terutama *Belt and Road Initiative* (BRI), dengan pemerintahan baru yang dibentuk oleh Taliban yang menyatakan ingin bergabung dalam proyek *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC) (Encarnation & Fair, 2023). *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC) merupakan kerja sama ekonomi antara Tiongkok dan Pakistan yang terfokus pada pembangunan jalur transportasi untuk mempermudah kegiatan perdagangan dan pertukaran informasi serta budaya di wilayah Asia Tengah. Proyek ini juga merupakan bagian dari *Belt and Road Initiative* (BRI) milik Tiongkok (CPEC, 2016). Keputusan ini didukung dengan pernyataan pemerintahan Taliban yang bersifat terbuka dengan investasi asing dan kerja sama ekonomi, terutama Tiongkok dan proyek BRI-nya.

Naiknya kembali Taliban ke pemerintahan Afganistan membuat kondisi politik negara tersebut menjadi tidak stabil. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Claire Mills, et al. (2022) dengan judul “*Afghanistan: One Year Under a Taliban Government*,” pemerintahan Afganistan bentukan Taliban di tahun 2021 dideskripsikan sebagai pemerintahan yang buram dan tidak konsisten. Susunan pemerintahan yang dibentuk oleh Taliban masih berbentuk interim atau pemerintahan sementara. Pemerintahan interim tersebut juga tidak memiliki konstitusi negara yang sah. Struktur pemerintahannya juga masih belum inklusif dan tidak memiliki kerangka kerja yang spesifik. Hal ini juga dikarenakan tidak

adanya visi dan misi negara yang jelas serta konsisten sebagai pedoman bagi pejabat pemerintahan untuk menjalankan tugasnya (Mills et al., 2022). Selain itu, ketidakkonsistenan pemerintahan Afganistan yang dibentuk oleh Taliban juga dipengaruhi sistem pengambilan keputusan yang terpusat di pemimpin mereka, yaitu Hibatullah Akhundzada, walaupun secara internal kelompok Taliban terbagi menjadi beberapa faksi dan kubu. Adanya perbedaan ideologi dan pemahaman terkait orientasi dan tujuan pemerintahan membuat kondisi internal pemerintahan Afganistan menjadi tidak stabil (Brown, 2023).

Di dalam internal kelompok Taliban terbagi menjadi dua faksi utama, yaitu faksi moderat dan faksi garis keras. (1) Faksi moderat merupakan sekelompok anggota Taliban yang menggunakan pendekatan yang lebih berorientasi terhadap dunia internasional. Salah satu anggota faksi ini adalah Wakil Perdana Menteri Mullah Baradar. Faksi moderat cenderung mengadvokasi Hibatullah Akhundzada sebagai pemimpin utama Pemerintah Afganistan untuk meningkatkan partisipasi Afganistan di dunia internasional demi mendapatkan pengakuan resmi sebagai negara berdaulat (Mills et al., 2022). (2) Faksi garis keras yang salah satu anggotanya adalah pemimpin utama pemerintahan Afganistan, yaitu Hibatullah Akhundzada. Faksi ini menggunakan pendekatan ideologis yang berfokus untuk mengimplementasikan hukum syariat islam dalam proses pemerintahan Afganistan. Mereka juga menganggap bahwa partisipasi di dunia internasional tidak diperlukan untuk menjaga

implementasi hukum syariat tersebut (Mills et al., 2022). Adanya perbedaan tujuan dan orientasi dari dua faksi ini dapat dilihat dari bagaimana Hibatullah Akhundzada yang tetap mempertahankan kebijakan pelarangan terhadap perempuan untuk mengenyam pendidikan walau ada beberapa penolakan dari faksi Taliban itu sendiri. Hal ini dipengaruhi oleh tekanan internasional yang memaksa agar kebijakan tersebut dihilangkan, namun karena Hibatullah Akhundzada sebagai pemimpin utama Afghanistan menolak untuk menarik kebijakan itu, usaha Afghanistan di bawah pimpinan Taliban untuk mendapatkan dukungan internasional menjadi cukup sulit (United Nations, 2022).

Kondisi politik serta pemerintahan yang belum stabil ini dapat berpengaruh kepada tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Afghanistan. Menurut Aisen dan Veiga dalam artikelnya yang berjudul *“How Does Political Instability Affect Economic Growth?”*, ketidakstabilan kondisi politik suatu negara secara keseluruhan berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi negara tersebut (Aisen & Veiga, 2010). Kemudian, berdasarkan artikel jurnal *“Treading Lightly: China’s Footprint In A Taliban-Led Afghanistan”* yang ditulis oleh Jiayi Zhou, Fei Su dan Jingdong Yuan, Proyek *Belt and Road Initiative* merupakan proyek pembangunan ekonomi Tiongkok yang cukup masif dan memerlukan kondisi negara yang stabil, terutama dalam segi politik (Zhou et al., 2022). Ketidakstabilan politik berpengaruh langsung terhadap tingkat produktivitas negara serta kualitas tenaga kerja sebagai modal fisik untuk

melakukan produksi (Aisen & Veiga, 2010). Berdasarkan hal tersebut, keputusan Tiongkok untuk melanjutkan kerja sama BRI dengan pemerintahan Taliban yang masih dalam masa transisi pemerintahan menjadi sedikit berisiko.

Berdasarkan penjelasan di atas, topik ini perlu untuk diteliti lebih lanjut. Fokus dari penelitian ini adalah terkait alasan yang melatarbelakangi keberlanjutan kerja sama *Belt and Road Initiative* antara Tiongkok dan Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban tahun 2021. Penelitian ini menganalisis hal tersebut karena adanya kontradiksi dari situasi yang dihadapi Tiongkok pasca naiknya Taliban kembali ke pemerintahan Afghanistan. Hal ini berupa kondisi Afghanistan yang tidak stabil, didukung oleh sektor ekonomi yang terus menurun dan sektor finansial yang kolaps akibat transisi pemerintahan. Selain itu, hubungan kelompok Taliban dengan ETIM juga memberikan kerentanan di perbatasan Tiongkok dan Afghanistan, terutama di Provinsi Xinjiang. Respon yang diberikan Tiongkok terhadap naiknya Taliban juga berbeda dengan beberapa negara di dunia, saat sebagian besar negara tidak mendukung tindakan kelompok Taliban. Sebaliknya, Tiongkok tidak menentang pemerintahan Taliban dan melanjutkan salah satu kerja samanya dalam proyek *Belt and Road Initiative* yang sebelumnya sudah dilaksanakan dengan pemerintahan Afghanistan sebelumnya.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah terkait “Mengapa Tiongkok mendorong kerja sama proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) dengan Afghanistan di bawah pemerintahan kelompok Taliban walaupun kondisi politiknya sedang tidak stabil karena dalam masa transisi?”

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

### 1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan terkait dinamika hubungan kerja sama Afghanistan dan Tiongkok secara umum, terutama dalam kaitannya dengan proyek *Belt and Road Initiative* (BRI)

### 2. Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor - faktor dibalik keberlanjutan kerja sama *Belt and Road Initiative* antara Tiongkok dan Afghanistan pasca naiknya Taliban pada tahun 2021.

## 1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan penelitian ini sebagai berikut.

### 1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian-penelitian dan menambah wawasan terkait

kerja sama ekonomi dan politik luar negeri Tiongkok terhadap wilayah Asia Tengah, khususnya Afghanistan dalam bidang ilmu Hubungan Internasional.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya tentang kerja sama ekonomi dan politik luar negeri Tiongkok, terutama di wilayah Asia Tengah.

## 1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

### 1.5.1. State of The Art

Dalam menentukan *State of The Art* dari penelitian ini, perlu untuk melakukan tinjauan pustaka mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Hubungan Kerja Sama Tiongkok dan Afghanistan, serta kaitannya dengan Proyek BRI. Tinjauan pustaka di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

| No.                                | Judul                                                                   | Metode atau Teori                                                                                                                       | Topik                                                                                                                                                                              | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                 | <i>China and the Taliban: Past as prologue?</i>                         | Dilakukan dengan metode <i>historical overview</i> terkait hubungan Tiongkok dengan Afghanistan dan Taliban.                            | Membahas tentang hubungan historis Tiongkok dan Taliban, serta tantangan yang dihadapi Tiongkok dalam menjalani kerja sama dengan Taliban.                                         | Tiongkok telah menjalani kerja sama sejak masa pemerintahan Taliban tahun 1996 - 2001 sampai ke masa pemerintahan 2021. Kerja sama antar kedua pihak memiliki beberapa tantangan, yaitu adanya potensi konflik perbatasan dan hubungan antara Taliban dan ETIM.                |
| Sumber: (Encarnation & Fair, 2023) |                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.                                 | <i>Treading Lightly: China's Footprint In A Taliban-Led Afghanistan</i> | Dilakukan dengan metode eksaminasi terhadap jangkauan Tiongkok serta keikutsertaannya dalam bidang keamanan, ekonomi, dan humanitarian. | Membahas terkait hubungan historis antara Tiongkok dan Taliban, serta peran dan tantangan yang dihadapi Tiongkok dalam menjalin kerja sama dengan pemerintahan Taliban tahun 2021. | Walaupun Tiongkok sudah menjalani kerja sama dengan Taliban sejak masa pemerintahan Taliban tahun 1996, Tiongkok tidak bisa menjalin hubungan kerja sama yang intens dengan pemerintahan Taliban tahun 2021 karena instabilitas keamanan dan politik dalam negeri Afghanistan. |
| Sumber: (Zhou et al., 2022)        |                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.                                 | <i>The Us Withdrawal and One Belt One</i>                               | Menggunakan metode asesmen strategis untuk                                                                                              | Membahas terkait tantangan dan hambatan yang dihadapi                                                                                                                              | Tiongkok akan mendapatkan tantangan berupa persaingan ekonomi                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Road: Chinese Concerns and Challenges in Afghanistan</i>                                                                      | menganalisis tantangan dalam hubungan kerja sama Tiongkok dan Taliban tahun 2021 | Tiongkok dalam menjalin kerja sama dengan Pemerintah Taliban pada tahun 2021.                                         | dengan negara-negara lainnya di Asia Tengah, kemudian juga ancaman keamanan terhadap proyek-proyeknya di Afghanistan.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Sumber: (Jin, 2016)                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. | <i>China's Afghan Policy: De Facto Recognition of the Taliban Regime</i>                                                         | Menggunakan teori <i>Rational Choice</i> untuk menjelaskan perilaku Tiongkok.    | Membahas terkait alasan Tiongkok melakukan pengakuan secara <i>de facto</i> terhadap pemerintahan Taliban tahun 2021. | Pengakuan <i>de facto</i> memberikan beberapa keuntungan bagi Tiongkok, yaitu adanya jaminan perlindungan keamanan, akses proyek eksplorasi Sumber Daya Alam Afghanistan, membentuk citra, mempertahankan kerja sama dengan Amerika Serikat terkait terorisme internasional, serta mempertahankan keamanan melalui aliansi <i>Shanghai Cooperation Organization</i> (SCO). |
|    | Sumber: (Umami & Cipto, 2023)                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. | <i>China's Economic Diplomacy Through the Belt and Road Initiative (BRI) to Increase China's Hegemony in the Southeast Asian</i> | Menggunakan konsep hegemoni untuk menganalisis hegemoni Tiongkok.                | Menganalisis terkait diplomasi ekonomi Tiongkok di Asia Tenggara melalui proyek BRI.                                  | Diplomasi Tiongkok melalui BRI dapat terbilang sukses karena berhasil mengajak banyak negara untuk ikut serta di dalam proyek ini. Dengan elemen pengaruh, penggunaan aset, dan sinergi yang dilakukan oleh Tiongkok berhasil mengubah arah                                                                                                                                |

|    |                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Region</i>                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                        | negara-negara yang sebelumnya defensif dengan hadirnya BRI. Hal ini menunjukkan adanya hegemoni Tiongkok di negara-negara tersebut.                                                                             |
|    | Sumber: (Sumadinata, 2023)                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. | <i>Afghanistan and the Belt and Road Initiative</i>                                                     | Menggunakan metode analisis dan diskusi terkait tantangan yang muncul dari Proyek BRI  | Membahas terkait ekspektasi dan tantangan yang dihadapi Afghanistan setelah ikut serta dalam proyek BRI                                                                | Kerja sama proyek BRI memberikan keuntungan ekonomi baik bagi Tiongkok dan juga Afghanistan. Hal ini dikarenakan terbukanya kesempatan untuk memajukan kerja sama dan konektivitas regional melalui proyek BRI. |
|    | Sumber: (Roy, 2017)                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. | Kerja Sama Ekonomi-Politik Indonesia dan Cina pada Implementasi Program <i>Belt and Road Initiative</i> | Menggunakan konsep Kerja Sama Internasional dalam menganalisis proyek BRI di Indonesia | Membahas terkait kerja sama Indonesia dengan Tiongkok dalam lingkup ekonomi dan politik dalam proyek BRI, serta bagaimana implikasinya terhadap pembangunan Indonesia. | BRI dapat dikatakan sebagai manifestasi kebijakan luar negeri Tiongkok. Bagi pembangunan Indonesia, proyek BRI dapat membantu memajukan pembangunan infrastruktur, transportasi, desa, dan pembangunan lainnya. |
|    | Sumber: (Putri & Ma'arif, 2019)                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |
| 8. | <i>The Rise of China:</i>                                                                               | Menggunakan teori                                                                      | Membahas terkait mengapa                                                                                                                                               | Indonesia memilih untuk                                                                                                                                                                                         |

|     |                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <i>Case Study Belt and Road Initiative in Indonesia</i>                                                                   | Stabilitas Hegemoni dan <i>Rational Choice</i>                                     | Indonesia memilih untuk berkolaborasi dengan Tiongkok dalam proyek BRI.                                                            | berkolaborasi dengan Tiongkok dikarenakan manfaat yang diberikan terhadap usaha pemenuhan kepentingan Indonesia. Dalam hal ini, proyek BRI dapat mendorong pembangunan infrastruktur yang merata ke seluruh Indonesia.                             |
|     | Sumber: (Ifatari & Risman, 2020)                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9.  | Transisi China Terhadap Ekonomi Global: Internasionalisasi dalam Perspektif Pembangunan Model China dan Dinamika Regional | Menggunakan konsep <i>strategic transition</i> dalam politik luar negeri Tiongkok. | Membahas terkait transisi Tiongkok ke tahap ekonomi global, terutama dalam aspek pembangunan.                                      | Transisi yang terjadi dalam perekonomian Tiongkok dari domestik ke internasional terjadi karena penggunaan instrumen proyek BRI sebagai program pembangunan dan instrumen keuangan.                                                                |
|     | Sumber: (Alfian, 2021)                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. | Kondisi Politik dan Keamanan Afghanistan di Bawah Rezim Taliban dan Signifikansinya terhadap Geopolitik Global            | Menggunakan metode <i>annotated library</i> untuk menganalisis masalah penelitian. | Menganalisis dan membahas tentang kondisi politik dan keamanan Taliban pasca naiknya kelompok Taliban ke pemerintahan Afghanistan. | Naiknya Taliban ke pemerintahan Afghanistan menyebabkan instabilitas politik dan keamanan dalam jangka waktu yang panjang, hal tersebut juga berdampak terhadap geopolitik global, terutama tentang kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri |

|     |                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 | negara-negara di sekitar Afghanistan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Sumber: (Anugerah & Purba, 2021)                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11. | Politik Islam di Afghanistan: Studi terhadap Kekuasaan Kelompok Taliban | Menggunakan metode <i>Historical Analysis</i> untuk menganalisis peran kelompok Taliban di Pemerintahan Afghanistan. | Membahas terkait bagaimana pengaruh konflik di Afghanistan terhadap munculnya kelompok Taliban. | Afghanistan adalah negara yang tidak terpisahkan dari unsur peperangan. Hal ini dapat dilihat di masa pemerintahan Taliban tahun 2021, ketika Taliban menjadi penguasa dengan gaya kepemimpinan otoritarian, dibarengi dengan kondisi pemerintahan yang kurang kondusif akibat banyaknya pembatasan terhadap kebebasan masyarakat, terutama wanita. |
|     | Sumber: (Fatianda, 2023)                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

(Sumber: diolah dari berbagai sumber)

Berdasarkan tabel 1.1, penelitian terdahulu terkait hubungan kerja sama antara Tiongkok dan Taliban, serta Afghanistan sebagian membahas tentang hubungan historis antara kedua negara tersebut. Tiongkok sudah menjalani hubungan kerja sama dengan kelompok Taliban sejak masa pemerintahannya di tahun 1996-2001. Setelah itu, Tiongkok juga menjalankan kerja sama dengan pemerintahan Afghanistan yang berada di bawah rezim Amerika Serikat. Kemudian, Tiongkok kembali melanjutkan kerja sama dengan pemerintahan Taliban di tahun 2021 (Encarnation & Fair, 2023; Zhou et al., 2022).

Kemudian, penelitian terdahulu terkait hubungan Tiongkok, Taliban dan Afghanistan juga menganalisis tentang tantangan serta pengaruh yang akan dihadapi Tiongkok dalam hubungan kerja samanya dengan Afghanistan. Terkait dengan hal tersebut, Tiongkok menghadapi beberapa tantangan dalam menjalin kerja sama dengan Afghanistan, yaitu eksistensi konflik perbatasan antara kelompok terorisme, instabilitas kondisi keamanan dan politik Afghanistan, ancaman terhadap keamanan proyek-proyek Tiongkok, dan persaingan ekonomi dengan negara-negara di Asia. Kemudian, terkait dengan pengaruh dukungan Tiongkok terhadap pemerintahan Taliban berupa keuntungan yang didapatkan dalam aspek keamanan, politik dan ekonomi (Encarnation & Fair, 2023; Jin, 2016; Umami & Cipto, 2023; Zhou et al., 2022).

Kemudian, juga terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas dinamika Tiongkok dan Proyek BRI. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, proyek BRI merupakan sebuah kerja sama ekonomi yang memberikan pengaruh signifikan dalam proses implikasinya baik bagi Tiongkok dan negara-negara anggotanya. Pengaruh tersebut dapat berupa perluasan hegemoni Tiongkok baik secara politik dan juga keamanan. Kemudian juga memberikan keuntungan ekonomi, terutama berkaitan dengan pembangunan dalam negeri dan peningkatan perdagangan internasional (Alfian, 2021; Ifatari & Risman, 2020; Putri & Ma'arif, 2019; Roy, 2017; Sumadinata, 2023).

Selain itu, juga terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang membahas terkait dinamika pemerintahan kelompok Taliban. berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, naiknya Taliban ke kursi pemerintahan Afghanistan memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi ketidakstabilan politik dan keamanannya dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian, pemerintahan Taliban juga tergolong otoritarian dan tidak kondusif akibat aturan ketat, berdasar kepada hukum syariat islam, yang diterapkan oleh pemerintahannya (Anugerah & Purba, 2021; Fatianda, 2023).

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, kajian berkaitan dengan Hubungan Kerja Sama Tiongkok dan Afghanistan dalam

Proyek BRI didominasi oleh pembahasan terkait dampak, tantangan, serta pengaruh hubungan kerja sama tersebut bagi Tiongkok dan juga Afghanistan. Kemudian, kajian mengenai proyek BRI itu sendiri didominasi oleh pembahasan terkait dampak dan pengaruh pelaksanaannya, baik bagi Tiongkok maupun negara-negara anggota BRI. Adanya perkembangan keberlanjutan kerja sama proyek BRI di masa pemerintahan Taliban tahun 2021, bersamaan dengan tantangan serta hambatan yang dihadapi oleh Tiongkok sebagai inisiator BRI, penelitian-penelitian terdahulu belum mengkaji mengapa kerja sama tersebut dapat dilanjutkan. Maka dari itu, penelitian ini penting untuk melengkapi kajian berkaitan dengan dinamika hubungan Tiongkok dan Afghanistan, terutama dalam pelaksanaan proyek BRI. Dalam hal tersebut, penelitian ini mengangkat masalah terkait mengapa kerja sama proyek BRI antara Tiongkok dan Afghanistan pasca Taliban berkuasa kembali didorong.

Penelitian ini menggunakan teori liberalisme interdependensi sebagai alat untuk menjawab rumusan masalah. Jika ditinjau dari penelitian terdahulu, kajian terdahulu didominasi analisis menggunakan teori *rational choice* dan konsep-konsep dari teori realisme dan neorealisme. Penggunaan teori-teori tersebut memang sudah memberikan hasil analisis yang cukup komprehensif terkait fenomena penelitian ini, namun hasil analisis

tersebut hanya memberikan penjelasan dari satu perspektif negara. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan teori liberalisme interdependensi untuk memberikan penjelasan dari kedua perspektif negara yang menjalin kerja sama. Selain itu, fenomena kerja sama BRI antara Tiongkok dan Afghanistan ini sesuai dengan premis teori liberalisme interdependensi, yaitu suatu fenomena ketika negara cenderung memilih untuk menjalin kerja sama untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

#### **1.5.2. Liberalisme Interdependensi**

Liberalisme interdependensi merupakan aliran dari pendekatan Liberalisme yang muncul pada abad 18 dan abad 19. Menurut Richard Rosecrance dalam bukunya yang berjudul *The Rise of Trading State*, sistem internasional sebelumnya menggunakan sistem politik-militer, ketika negara dianggap sebagai entitas homogen yang terfokus dalam penggunaan perang serta konflik untuk menjaga keseimbangan kekuatan dan hegemoni demi menjaga perdamaian dunia. Sistem ini digunakan oleh negara-negara adidaya dengan sumber daya keamanan yang memadai untuk melakukan peperangan. Namun, pasca konflik Perang Dunia 2, saat muncul banyak negara baru di dunia ketiga, pendekatan politik dan militer tidak lagi efisien untuk menjaga perdamaian karena adanya perbedaan kekuatan pertahanan antar negara adidaya dan negara baru. Alih-alih menjaga perdamaian,

perang dan konflik yang terjadi hanya menimbulkan kerusakan dan kerugian yang lebih besar untuk seluruh negara.

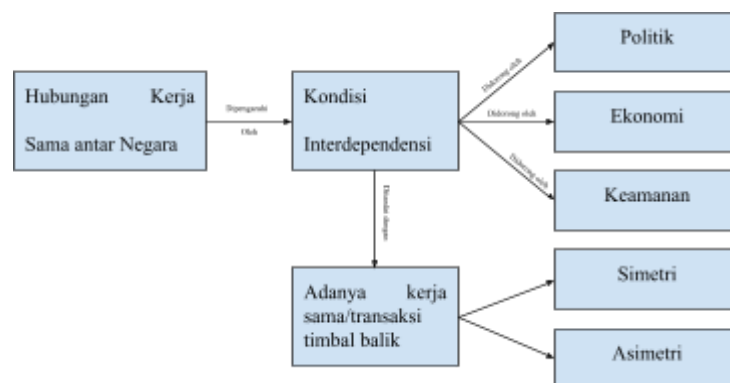
Hal ini kemudian menyebabkan negara-negara di dunia mulai menggunakan sistem perdagangan, kemudian negara tidak lagi dianggap sebagai suatu entitas yang sama melainkan dikelompokkan berdasarkan fungsinya (Rosecrance, 1986). Adapun fungsi-fungsi tersebut dibedakan berdasarkan sumber daya yang dimiliki negara dan kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Perbedaan fungsi ini menciptakan situasi saling ketergantungan antar negara untuk melakukan transaksi perdagangan demi memenuhi kebutuhan ekonomi dalam negeri. Di dalam situasi tersebut, negara tidak lagi menggunakan perang atau konflik sebagai alat untuk mencapai kepentingannya, melainkan menggunakan kerja sama atau perdagangan. Kerja sama tersebut kemudian akan menciptakan situasi damai tanpa konflik dalam hubungan antar negara.

Premis awal yang menjadi dasar dari aliran liberalisme interdependensi adalah fakta bahwa manusia yang hidup dengan manusia lainnya masing-masing merasa saling membutuhkan (Dugis, 2016). Dalam arti bahwa semua kejadian yang dialami oleh satu individu berpengaruh terhadap individu disekitarnya. Berangkat dari premis ini, jika diterapkan dalam hubungan internasional, hal tersebut mencerminkan hubungan saling

ketergantungan antar negara. Kondisi saling ketergantungan atau interdependensi ini lah yang menjadi dasar bagi para negara untuk melakukan kerja sama ekonomi internasional. Seperti yang dijelaskan dalam *The Rise of Trading State* oleh Rosecrance (1989), Kerja sama antar negara tersebut membawa dunia internasional ke dalam situasi damai tanpa konflik (Rosecrance, 1986). Perdagangan dan ketergantungan secara ekonomi menjadi insentif terhadap perdamaian dan kerja sama (Dugis, 2016).

Menurut Keohane dan Nye, kondisi Interdependensi dapat didefinisikan sebagai kondisi *mutual dependence* antar aktor internasional. Adanya efek timbal-balik dari interaksi antar aktor internasional menciptakan kondisi saling ketergantungan (Keohane & Nye, 2012). Selain itu, kondisi interdependensi dibuktikan dengan adanya aliran dan transaksi uang, barang, manusia, serta informasi yang melewati lintas batas negara. Walaupun transaksi antar aktor internasional menjadi salah satu faktor munculnya kondisi interdependensi, faktanya tidak semua transaksi dapat menimbulkan kondisi ketergantungan. Menurut Keohane dan Nye, hanya transaksi dengan harga mahal yang dapat menimbulkan kondisi interdependensi antar negara. Berangkat dari asumsi bahwa jika transaksi itu terdisrupsi, maka kedua aktor internasional juga dapat merasakan efek yang cukup signifikan dalam usaha mencapai kepentingan nasionalnya.

Kondisi interdependensi juga tidak selalu menggambarkan hubungan kerja sama yang seimbang atau simetris. Adapun hubungan kerja sama asimetri lah yang sebagian besar menciptakan kondisi ketergantungan antar dua belah pihak. Interdependensi dapat digunakan untuk mendorong aspek ekonomi, keamanan dan politik suatu negara. Dalam kondisi interdependensi, negara tidak lagi menggunakan *power* atau militer dalam mencapai kepentingannya. Melainkan dengan tindakan persuasif menggunakan *soft power* sehingga dalam hubungan kerja sama yang asimetri, interdependensi dapat digunakan sebagai alat tawar menawar suatu isu untuk mempengaruhi isu lainnya di suatu negara (Keohane & Nye, 2012). Dengan adanya kondisi interdependensi ini, negara dapat memelihara kondisi stabilitas ekonomi dan politik, serta juga dapat mencegah terjadinya konflik.



**Gambar 1.1 Asumsi Teori Liberalisme Interdependensi**

(Sumber: Diolah dari berbagai sumber)

Maka dari itu berdasarkan gambar 1.1, indikator teori liberalisme interdependensi yang digunakan untuk menganalisis

rumusan masalah adalah bagaimana kondisi interdependensi tersebut muncul akibat ambisi negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kondisi interdependensi ditandai dengan eksistensi kerja sama atau transaksi antar dua negara atau lebih. Kondisi interdependensi ini terdiri dari dua jenis, yaitu simetri dan asimetri. Dalam hal ini kondisi interdependensi didorong dengan tujuan untuk mendorong aspek ekonomi, politik, serta keamanan suatu negara. Asumsi tersebut berangkat dari pemikiran Adam Smith, seorang tokoh ekonomi klasik, yang berpendapat bahwa perdagangan atau transaksi ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dapat menciptakan suatu harmoni sosial (Rosyidin, 2020).

Terkait dengan masing-masing faktor pendorong kondisi interdependensi, terdapat tiga faktor utama sebagai berikut.

#### 1. Faktor Ekonomi

Berkaitan dengan kepentingan ekonomi, kondisi interdependensi yang muncul dapat memberikan pengaruh dan manfaat terhadap keinginan negara untuk meningkatkan pertumbuhan serta pembangunan dalam negerinya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, antar negara memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga munculnya kondisi tiap negara harus berdagang untuk memenuhi kebutuhannya.

Maka dari itu, dari kondisi ini muncul situasi saling ketergantungan antar negara (Keohane & Nye, 2012).

Hal ini kemudian dapat dicapai dengan kerja sama ekonomi internasional. Pada dasarnya, kerja sama ekonomi internasional digunakan oleh negara untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan ekonomi (Andruseac & Hertug, 2015).

## 2. Faktor Politik

Kemudian, terkait dengan kepentingan politik, kondisi interdependensi tidak hanya terjadi secara simetris, namun juga secara asimetri. Dalam konteks hubungan asimetris ini, kondisi interdependensi dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong aspek politik (Keohane & Nye, 2012).

Dalam mendorong aspek politik, negara cenderung menggunakan *soft power* sebagai alat untuk mencapai kepentingan. Menurut Nye (2004), *soft power* merupakan bentuk kekuatan yang bukan berasal dari militer, namun sebuah strategi yang digunakan untuk membangun nilai dan norma bersama antar negara, dengan tujuan akhir untuk pencapaian kepentingan (Nye, 2004). *Soft Power* sendiri dapat dimanifestasi

dalam bentuk diplomasi. Jika dikaitkan dengan studi kasus, proyek BRI juga merupakan bentuk diplomasi, yaitu dalam kategori diplomasi pembangunan. Melalui diplomasi pembangunan, promosi terkait dengan bantuan pembangunan ekonomi digunakan negara untuk menyebarkan pengaruhnya ke negara lain.

### 3. Faktor Keamanan

Terakhir, dalam kaitannya dengan keamanan. Adanya kondisi interdependensi, terutama dalam kegiatan perdagangan, dapat meningkatkan biaya dan mengurangi manfaat dari perang dan konflik (Moravcsik, 1992). Berangkat dari asumsi teori, bahwasanya kondisi interdependensi mendorong negara untuk menggunakan *soft power* daripada menggunakan metode koersif. Hal ini dapat dicapai melalui kerja sama internasional maupun upaya diplomasi. Dengan demikian, *conflict prevention* dapat tercapai dengan adanya kondisi interdependensi tersebut.

#### 1.5.3. Konsep Diplomasi Pembangunan

Diplomasi pembangunan pada dasarnya adalah konsep yang berangkat dari bentuk-bentuk diplomasi publik. Penggunaan diplomasi merupakan salah satu aspek teori liberalisme

interdependensi. Hal ini berkaitan dengan asumsi teori, yaitu fenomena dalam membangun hubungan antar negara yang didasari oleh pemakaian *soft power* untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan metode persuasif dan tanpa kekerasan. Berangkat dari tujuan untuk mempromosikan pembangunan dan pertumbuhan di negara-negara berkembang, diplomasi pembangunan biasanya menjadi alat bagi negara maju untuk mencapai kepentingan nasionalnya (Gulrajani et al., 2020). Dalam hal ini, tujuan yang ingin dicapai melalui diplomasi pembangunan biasanya berkaitan dengan keinginan negara pengirim untuk mempengaruhi persepsi, preferensi, dan tindakan negara penerima agar sesuai dengan kepentingan negara pengirim tersebut.

Dalam mempraktikkan diplomasi pembangunan, negara akan mengirim bantuan untuk mendorong pembangunan di negara berkembang. Aspek *soft power* dari diplomasi pembangunan ini sendiri dapat berupa sumber daya ilmu pengetahuan, politik, budaya, sejarah, jaringan media dan pendidikan, serta kebijakan sosial dan hukum (Gulrajani et al., 2020). Aspek-aspek tersebut selain ditujukan untuk membantu pembangunan dan pertumbuhan di negara berkembang, bagi negara pengirim juga memiliki manfaat untuk meningkatkan reputasi negara pengirim dalam suatu hubungan bilateral maupun di kancah internasional.

#### **1.5.4. Konsep Kerja Sama Ekonomi Internasional**

Kerja sama ekonomi merupakan suatu bentuk kolaborasi antara dua pihak yang memiliki tujuan berupa pencapaian terhadap keuntungan secara mutual menggunakan alat-alat seperti sumber daya finansial dan teknologi. Konsep kerja sama ekonomi internasional merupakan salah satu aspek dari indikator teori liberalisme interdependensi. Dalam asumsi teori tersebut, negara cenderung untuk menjalin kerja sama dengan negara lain untuk mendapatkan keuntungan, salah satunya adalah kerja sama ekonomi internasional. Dalam tingkat internasional, kerja sama ekonomi ini dilakukan oleh entitas aktor internasional, seperti negara, organisasi, korporasi, dan sejenisnya (Andruseac & Hertug, 2015). Tujuan dari kerja sama ekonomi internasional adalah untuk mencapai keuntungan dalam berbagai bidang, seperti industri, agrikultur, komersial, ilmu pengetahuan, perdagangan, dan sebagainya.

Di dalam hubungan internasional, liberalisme memandang kerja sama ekonomi sebagai salah satu cara untuk mencapai kondisi perdamaian di dalam sistem internasional. Negara berperan sebagai pelindung bagi pasar bebas dan kebebasan dalam berdagang (Andruseac & Hertug, 2015). Kerja sama ekonomi antar dua negara ini juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan serta memenuhi kebutuhan dalam negeri demi mencapai kesejahteraan masyarakatnya.

## 1.6. Operasionalisasi Konsep

Di dalam operasionalisasi konsep ini menjabarkan definisi-definisi konseptual dan operasional dari konsep-konsep yang digunakan di dalam penelitian ini.

### 1.6.1. Definisi Konseptual

#### 1. Diplomasi Pembangunan

Diplomasi pembangunan adalah salah satu bentuk diplomasi yang bertujuan untuk membangun hubungan bilateral dengan memberikan bantuan dan mempromosikan pembangunan negara berkembang (Gulrajani et al., 2020)

#### 2. Kerja Sama Ekonomi Internasional

Kerja sama ekonomi internasional merupakan suatu bentuk kolaborasi antara dua aktor internasional yang memiliki tujuan berupa pencapaian terhadap keuntungan secara mutual menggunakan alat-alat seperti sumber daya finansial dan teknologi (Andruseac & Hertug, 2015)

#### 1.6.1.1. Definisi Operasional

##### 1. Diplomasi Pembangunan

Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi pembangunan untuk menjabarkan penggunaan bentuk *soft power* yang digunakan Tiongkok dalam kaitannya dengan proyek BRI. Berdasarkan asumsi teori liberalisme interdependensi, negara cenderung menggunakan *soft power*

untuk mencapai kepentingan ketika di dalam kondisi interdependensi. Operasionalisasi konsep diplomasi pembangunan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Komitmen pemerintahan Tiongkok dalam memberikan dukungan dalam kerja sama pembangunan antar negara. Dalam hal ini, Afghanistan menjadi salah satu negara berkembang yang mendapatkan bantuan dari pemerintah Tiongkok. Pasca naiknya kembali Taliban sebagai pemerintahan resmi Afghanistan, Tiongkok sudah menunjukkan dukungannya terhadap upaya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Afghanistan.
- 2) Penggunaan Proyek BRI sebagai bentuk diplomasi pembangunan dalam usaha mencapai kepentingan nasional, menaikkan reputasi dan legitimasi pemerintahan baik bagi Tiongkok dan Afghanistan. Melalui proyek BRI, Tiongkok memberikan bantuan untuk mendorong pembangunan di Afghanistan. Hal ini kemudian dapat menaikkan reputasi dan pengaruh Tiongkok sebagai inisiator proyek BRI dan juga meningkatkan legitimasi pemerintahan Taliban di Afghanistan.

## 2. Kerja Sama Ekonomi Internasional

Konsep kerja sama ekonomi internasional di dalam penelitian ini digunakan untuk menjabarkan fenomena kerja sama antara Tiongkok dan Afghanistan yang menjadi hasil dari kondisi interdependensi. Bentuk dari kerja sama ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Proyek *Belt and Road Initiative*.

- 1) Kerja sama proyek BRI merupakan fenomena yang digunakan di dalam penelitian ini sebagai bentuk kerja sama ekonomi internasional. Proyek BRI merupakan proyek berskala besar yang bertujuan untuk membangun konektivitas serta kerja sama ekonomi dalam hal peningkatan investasi luar negeri dan pembangunan infrastruktur dengan negara-negara yang terkait. Kerja sama proyek BRI antara Tiongkok dan Afghanistan ditujukan untuk membangun jalur tambahan agar mempermudah kegiatan ekonomi di wilayah Asia Tengah (Ramezani & Devonshire, 2023).
- 2) Kerja sama proyek BRI digunakan untuk mencapai kepentingan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan keuntungan secara finansial bagi kedua negara. Proyek BRI digunakan untuk mendukung konektivitas perdagangan internasional baik bagi Tiongkok dan Afghanistan yang berada di bawah pemerintahan Taliban

### 1.7. Argumen Penelitian

Faktor dibalik keberlanjutan kerja sama *Belt and Road Initiative* antara Tiongkok dan Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban tahun 2021 dilatarbelakangi oleh kondisi interdependensi. Berangkat dari asumsi teori liberalisme interdependensi, yaitu adanya kerja sama serta transaksi antar dua aktor internasional dapat menimbulkan kondisi saling ketergantungan. Kondisi interdependensi tersebut kemudian digunakan untuk mendorong aspek ekonomi, politik, serta keamanan dari suatu negara. Jika dikaitkan dengan studi kasus, Tiongkok lebih memilih untuk melanjutkan kerja sama ekonominya berupa proyek *Belt and Road Initiative* dengan Afghanistan walaupun kondisi politik dan keamanan di Afghanistan yang tidak stabil, serta juga karena adanya potensi ancaman terhadap keamanan nasional Tiongkok. Hal ini karena Tiongkok membutuhkan Afghanistan untuk mendorong kepentingan ekonomi dan politiknya melalui proyek BRI, selain itu dengan kerja sama BRI ini pula Tiongkok dapat mencegah konflik yang berpotensi terjadi dari ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Di sisi lain, Afghanistan membutuhkan kerja sama ekonomi ini untuk meningkatkan investasi asing di negaranya demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur pasca transisi pemerintahan.

### 1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis terkait faktor dibalik keberlanjutan kerja sama *Belt and Road Initiative*

antara Tiongkok dan Afghanistan. Metode kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi faktor kausal dari suatu fenomena dan menganalisisnya secara mendalam.

#### **1.8.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe eksplanatif, karena fokus dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu fenomena. Terutama terkait faktor keberlanjutan kerja sama *Belt and Road Initiative* antara Tiongkok dan Afghanistan. Penelitian ini menganalisis bentuk-bentuk kepentingan ekonomi tersebut dan kaitannya dengan kerja sama *Belt and Road Initiative* yang dilakukan dengan Afghanistan.

#### **1.8.2. Situs Penelitian**

Situs penelitian merupakan tempat penelitian dilaksanakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *desk research*. Hal ini karena menimbang situs penelitian berada di luar negeri sehingga tidak memungkinkan bagi penelitian ini untuk dilakukan langsung ke lapangan. Dengan melalui *desk research*, penelitian ini tetap menyediakan data-data yang kredibel melalui dokumen yang tersedia di situs daring, seperti UNDP, *World Bank*, *Silk Road Briefing*, dan situs-situs resmi lainnya.

#### **1.8.3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan fokus utama dari penelitian itu sendiri. Penelitian ini berfokus pada Tiongkok sebagai fokus

utama di dalam penelitian ini. Tiongkok merupakan negara yang mengeluarkan program *Belt and Road Initiative*. Subjek kedua adalah Afghanistan sebagai negara yang bekerja sama dengan Tiongkok dalam proyek *Belt and Road Initiative* ini.

#### **1.8.4. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data yang bersifat tertulis atau teks berupa buku, jurnal, serta artikel yang terkait dengan kerja sama *Belt and Road Initiative* antara Tiongkok dan Afghanistan pada tahun 2021.

#### **1.8.5. Sumber Data**

Data yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder, yaitu data yang tidak bersumber langsung dari tangan pertama. Jenis data sekunder merupakan data yang ditulis atau diinterpretasikan kembali oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini didapatkan dari buku, artikel, dan jurnal. Walaupun sumber data yang digunakan tidak dari sumber pertama, data-data tersebut diambil dari sumber yang kredibel dan relevan.

#### **1.8.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan di dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan adalah teknik studi pustaka. Pengumpulan data dengan teknik studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan sumber sekunder dengan bentuk tertulis

dari buku, artikel, jurnal, koran, dan majalah yang fokus dalam topik terkait hubungan Afghanistan dengan negara-negara di wilayah Asia Tengah.

#### **1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Dalam proses penelitian ini, data-data yang dikumpulkan terkait kerja sama *Belt and Road Initiative* yang diambil dari sumber yang kredibel, pengumpulan data ini menggunakan teknik studi pustaka. Data-data tersebut kemudian diseleksi sesuai dengan cakupan penelitian yang terfokus pada Tiongkok, program *Belt and Road Initiative*, Afghanistan pada masa pemerintahan Taliban 2021, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi kerja sama tersebut. Penyeleksian data tersebut bertujuan untuk memilih data yang relevan agar sesuai dengan argumen penelitian. Tahap selanjutnya adalah analisis. Analisis dilakukan dengan metode *kongruen*, yaitu metode yang dilakukan dengan mencari kesesuaian antara variabel independen dari teori dengan data-data yang didapatkan. Melalui metode ini, data ditafsirkan melalui perspektif teori tertentu untuk mencocokkan asumsi teori dengan data yang tersedia.

#### **1.8.8. Kualitas Data**

Kualitas data yang digunakan di dalam penelitian ini kredibel dan valid. sumber-sumber data yang digunakan relevan dan kredibel. Dalam hal ini sumber yang digunakan berasal dari

situs Pemerintahan Tiongkok serta situs *Silk Road Briefing* yang merupakan situs resmi yang berisi informasi terkait perkembangan proyek *Belt and Road Initiative* milik Tiongkok.